



Pengarusutamaan Gender dalam Pemerintah Daerah: Studi Naratif tentang Aktor Wanita dalam Partisipasi Wawasan Kebangsaan

Nabila Listyadharna Putri¹, Teza Yudha², Mochamad Faizal Rizki^{3*}

Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Received: 3 November 2024

Revised: 14 November 2024

Accepted: 30 November 2024

Gender equality can be understood as a situation where men and women have equal treatment in all areas of life. One of the strategies in achieving gender equality is gender mainstreaming. This research intends to explore how gender mainstreaming in local government through participant experiences related to the participation of women actors in government programs. This research uses a qualitative approach with a study analysis based on the participant's experience story which then produces data in narrative form. This research was conducted based on the participation theory proposed by Cohen and Uphoff (1980) which includes four indicators, namely participation in decision making, participation in implementation, participation benefits and participation in evaluation. This participation theory became the basis for exploring participants' experiences related to the participation of women actors in realizing gender mainstreaming. The findings of this study indicate that local governments have been able to provide space for women actors to provide their participation, such as giving women actors the authority to participate in decision-making and providing opportunities for women actors to participate directly in the implementation of government programs

Keywords: Equality, Mainstreaming, Participation, Women,

(*) Corresponding Author: 2010631180091@student.unsika.ac.id, teza.yudha@fisip.unsika.ac.id,
mochamad.faizal@fisip.unsika.ac.id

How to Cite: Putri, N., Yudha, T., & Rizki, M. (2025). Pengarusutamaan Gender dalam Pemerintah Daerah: Studi Naratif tentang Aktor Wanita dalam Partisipasi Wawasan Kebangsaan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(3.B), 32-36. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10005>

PENDAHULUAN

Secara historis, Indonesia memiliki pola relasi gender yang sangat beragam, dan keragaman gender telah ada dalam beberapa tradisi lokal kemudian mulai pada rezim orde baru, pola relasi gender yang plural diseragamkan dan dimasukkan ke dalam "kepentingan nasional" secara umum, yaitu pembangunan. Reformasi telah membawa banyak perubahan pada politik gender di Indonesia dan demokrasi telah membuka berbagai peluang bagi gerakan Wanita untuk mendefinisikan kembali identitas Wanita dan mengadvokasi kebijakan kesetaraan gender. (Syukri, 2023) Kesetaraan gender sendiri dapat dipahami sebagai situasi laki laki maupun Wanita mempunyai perlakuan yang sama di semua bidang kehidupan. (Pervaiz et al., 2023)

Selanjutnya, dalam pasal 3 CEDAW (*The Convection on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) terkait prinsip kesetaraan, CEDAW mendorong negara negara untuk mengambil semua langkah langkah yang tepat kesetaraan gender. Hal ini mencakup peningkatan kesadaran, advokasi internasional, dan pengarusutamaan gender. (Guthridge et al., 2022) Pengarusutamaan gender sendiri adalah strategi untuk menjadikan keprihatinan dan



pengalaman Wanita dan laki-laki sebagai dimensi integral dari desain, implementasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program di semua bidang politik, ekonomi dan sosial kemasyarakatan sehingga Wanita dan laki-laki mendapatkan manfaat yang setara dan ketidaksetaraan tidak dilanggengkan. Tujuan akhir dari pengarusutamaan gender adalah kesetaraan gender. (Nations, 2022)

Dilanjut dengan Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender bahwa tiap instansi dan lembaga pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Daerah perlu melaksanakan pengarusutamaan gender atau strategi integrasi gender menjadi satu dimensi integral dalam terlaksananya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas segala kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing masing.

Dalam lingkup pemerintah daerah kota Bekasi, hal ini tercantum dalam peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2020 bahwa pengarusutamaan gender dilaksanakan dengan tujuan antara lain sebagai acuan aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah dan mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan Wanita serta meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab laki-laki dan Wanita sebagai insan dan sumberdaya pembangunan.

Hal ini juga didukung dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women) dalam pasal 3 dan 7 yang berbicara mengenai partisipasi Wanita dalam pemerintahan disebutkan bahwa di antara hak hak Wanita yang telah disebutkan adalah untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik dan untuk memegang jabatan publik serta menjalankan fungsi fungsi pemerintahan di segala tingkatan

Menurut Goetz dalam Dar dan Shairgojri (2022) tata kelola pemerintah yang baik mengharuskan seluruh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Partisipasi Wanita dalam pemerintah daerah merupakan hal krusial untuk mencapai kesetaraan gender di tempat kerja dan memajukan pembuatan kebijakan.

Berdasarkan hal ini, dengan menggunakan teori partisipasi menurut Cohen dan Uphoff (1980) peneliti tertarik untuk membahas lebih jauh terkait bagaimana partisipasi aktor Wanita dalam pemerintah daerah guna mengetahui pengarusutamaan gender melalui partisipasi aktor Wanita dalam program pemerintah daerah Wawasan Kebangsaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis studi yang diarahkan pada cerita pengalaman partisipan yang kemudian akan menghasilkan data dalam bentuk naratif. Berdasarkan hal ini, peneliti akan melakukan teknik pengumpulan data dengan wawancara yang berfokus terhadap cerita pengalaman partisipan. Selain itu, Clandinin and Connelly dalam Creswell

(2013) mengungkapkan bahwa sumber data dapat melalui beragam sumber seperti jurnal, catatan lapangan peneliti, dokumen, foto dan sumber lainnya.

Selanjutnya, Wawancara dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan deskripsi dari partisipan untuk pertanyaan tertentu. Meskipun terdapat banyak metode untuk penelitian kualitatif namun wawancara merupakan teknik yang paling umum digunakan untuk pengumpulan data karena memberikan suasana yang aman dan nyaman bagi partisipan (Taherdoost, 2022)

Partisipan dalam penelitian ini yakni, aktor Wanita dan pria pemerintah daerah Kota Bekasi dan Masyarakat peserta program pemerintah. Wawancara dilakukan dengan terstruktur. Dalam wawancara terstruktur ini, urutan dari susunan pertanyaan akan dibuat serupa untuk semua partisipan yang diwawancarai. Teknik wawancara ini akan memberikan kontrol penuh bagi pewawancara untuk mengatur proses wawancara dengan lebih baik. Dengan demikian hasil wawancara dapat dijabarkan dengan lebih mudah. (Taherdoost, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cohen dan Uphoff (1980) mengungkapkan bahwa partisipasi dibagi menjadi empat indikator yakni partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam implementasi, manfaat partisipasi dan partisipasi dalam evaluasi.

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Dalam indikator ini, pemerintah daerah kota Bekasi secara khusus memberikan wewenang kepada aktor Wanita untuk ikut turut serta dalam hal pengambilan keputusan mengenai program program wawasan kebangsaan Hal ini menunjukkan bahwa terdapat upaya kesetaraan gender yang diraih dengan memberikan kesempatan yang sama bagi aktor Wanita untuk turut ikut serta dalam pengambilan keputusan. Hal ini selaras dengan pengarusutamaan gender yang dapat dipahami sebagai instrumen strategis dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Adapun temuan menarik yang peneliti dapatkan di lapangan, misalnya ketika seorang partisipan merefleksikan pengalaman terkait partisipasi dalam pengambilan keputusan, "saya (Wanita) melakukan diskusi rutin minimal dua kali dalam seminggu demi sosialisasi wawasan kebangsaan ini dengan para staff (Pria dan Wanita) lainnya, diskusi yang dijalankan pun diskusi santai dengan kekeluargaan sehingga diskusi yang berjalan tidak monoton."

Melalui indikator partisipasi dalam pengambilan keputusan, studi naratif mampu mengeksplorasi bagaimana pentingnya komunikasi dalam partisipasi pengambilan keputusan ini sehingga terciptanya kesetaraan dan keadilan dengan menguatamakan kekeluargaan.

2. Partisipasi dalam Implementasi

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan para partisipan menunjukkan bahwa adanya partisipasi aktor Wanita dalam proses implementasi program sosialisasi wawasan kebangsaan.

Adapun hasil tersebut ditarik dari dominasi hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara dengan partisipan dalam penelitian ini. Seperti salah seorang partisipan membagikan pengalamannya mengenai partisipasi dalam implementasi, "Wanita disini dipercayai untuk hal hal administrasi seperti membuat dan memegang daftar hadir selama sosialisasi berlangsung, ada pula yang dipercayai menjadi pembawa acara maupun moderator". Begitupun dengan

partisipan lainnya yang mengungkapkan pendapat yang sama bahwa, “saya (Wanita) dipercayai untuk memandu acara sosialisasi.” yang kemudian diungkapkan kembali oleh partisipan lain bahwa, “saya (Wanita) bahkan sempat dipercayai untuk menjadi narasumber dalam sosialisasi dengan tema wawasan kebangsaan.”

Dalam indikator partisipasi dalam implementasi menunjukkan partisipasi langsung aktor Wanita, hal ini menunjukkan bahwa aktor Wanita memiliki kesempatan yang sama dengan laki laki untuk ikut turut serta selama program sosialisasi wawasan kebangsaan berlangsung sehingga tumbuh kesetaraan sebagai wujud dari hasil pengarusutamaan gender yang berhasil diterapkan.

3. Manfaat Partisipasi

Dalam hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diungkapkan bahwa dilihat dari manfaat partisipasi pada terdapat dua dimensi yakni relasi dan pengetahuan. Secara menyeluruh, memahami berbagai dimensi dalam manfaat partisipasi membantu seluruh aktor terutama aktor Wanita untuk mengoptimalkan program sosialisasi wawasan kebangsaan ini agar menjadi program yang berkelanjutan untuk memberikan manfaat yang nyata dalam pemahaman wawasan kebangsaan. Implikasi yang dapat dipertimbangkan pemerintah daerah dalam memberikan program sosialisasi wawasan kebangsaan ini yakni pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi ini dapat memberikan sosialisasi wawasan kebangsaan dengan mengusung tema pengarusutamaan gender di dalamnya dengan tetap mempertahankan bahwa aktor Wanita dan laki laki berhak untuk mendapatkan manfaat yang sama selama mengikuti program sosialisasi wawasan kebangsaan ini.

4. Partisipasi dalam Evaluasi

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan seluruh partisipan menunjukkan adanya koordinasi yang dilakukan aktor Wanita dan laki laki dalam memberikan evaluasi terkait program sosialisasi wawasan kebangsaan. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, seluruh partisipan mengungkapkan bahwa diperlukan koordinasi yang efektif dengan berbagai pihak guna menjalin kerja sama tim.

Pada indikator partisipasi dalam evaluasi memperlihatkan bahwa pengalaman dalam partisipasi memberikan evaluasi sangat penting dengan mengutamakan pengarusutamaan gender seperti membiarkan Wanita turut ikut serta dalam memberikan saran dan masukan mengenai keberlanjutan program sosialisasi wawasan kebangsaan ini.

KESIMPULAN

Temuan dalam penelitian ini berhasil menggali tema yang muncul seiring dengan cerita yang disampaikan oleh partisipan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengarusutamaan gender ditinjau dari partisipasi aktor Wanita oleh pemerintah daerah kota Bekasi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dalam program sosialisasi wawasan kebangsaan telah menunjukkan eksistensinya. Temuan penelitian menunjukkan tidak adanya bias gender yang menjadi sumber dari ketidaksetaraan gender dalam proses pengambilan keputusan sampai evaluasi program sosialisasi wawasan kebangsaan.

Untuk mempertahankan pelaksanaan pengarusutamaan gender ini dibutuhkan komitmen dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi itu sendiri. Pemerintah daerah perlu menyadari secara penuh strategi pengarusutamaan gender ini dalam meraih kesetaraan dan keadilan gender sehingga Wanita Wanita mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki laki dan mampu berdaya atas dirinya sendiri. Dalam komitmen ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dapat melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Wanita dan Anak sehingga pelaksanaan pengarusutamaan gender ini dapat bertahan eksistensi nya atau dapat ditingkatkan dengan melaksanakan program sosialisasi wawasan kebangsaan berbasis pengarusutamaan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World development*, 8(3), 213-235.
- Creswell, J. W. (2013) *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approach*, Lincoln: Sage Publication
- Dar, S. A. & Shairgojri, A. A. (2022). Role of Women in Good Governance. *Journal of Social Science*. 3(4). <https://doi.org/10.46799/jss.v3i4.360>
- Guthridge, M., Kirkman, M., Penovic, T. et al. Promoting Gender Equality: A Systematic Review of Interventions. *Soc Just Res* 35, 318–343 (2022). <https://doi.org/10.1007/s11211-022-00398-z>
- Pervaiz, Z., Akram, S., Ahmad Jan, S., & Chaudhary, A. R. (2023). Is gender equality conducive to economic growth of developing countries? *Cogent Social Sciences*, 9(2). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2243713>
- Syukri, M. (2023). Gender Policies of the new Developmental State: The Case of Indonesian new Participatory Village Governance. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 42(1), 110-133. <https://doi.org/10.1177/18681034221149750>
- Taherdoost, Hamed, *How to Conduct an Effective Interview; A Guide to Interview Design in Research Study* (August 1, 2022). *International Journal of Academic Research in Management*, 11(1):39-51, 2022
- United Nations Women (2022) *Handbook on Gender Mainstreaming for Gender Equality Results*